

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama: Pemenuhan Hak-hak Dasar Warga Jakarta

Politik

- Prospek Elektoral Demokrat Pasca-Kasus Nazaruddin ■
- Ruyati dan Perlindungan TKI ■

Sosial

- Berkeadilan Lingkungankah Tata Ruang Jakarta ■
- Merefleksi APBN untuk percepatan MDGs ■
- Persoalan Transportasi Publik Jakarta ■

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
LAPORAN UTAMA	
Problematika Pemenuhan Hak-hak Dasar Warga Jakarta	2
POLITIK	
Prospek Elektoral Demokrat Pasca-Kasus Nazaruddin	6
Ruyati dan Perlindungan TKI	9
SOSIAL	
Berkeadilan Lingkungankah Tata Ruang Jakarta	13
Merefleksi APBN untuk percepatan MDGs	16
Persoalan Transportasi Publik Jakarta	19
PROFILE INSTITUSI.....	23
PROGRAM RISET DAN PELATIHAN	24
ADVERTORIAL INDONESIA 2010	26

Tim Penulis :

Anies Baswedan (**Direktur Eksekutif & Riset**), Endang Srihadi (**Koordinator**),
Antonius Wiwan Koban, Benni Inayatullah, Hanta Yuda AR., Lola Amelia.

Editor : Adinda Tenriangke Muchtar

KATA PENGANTAR

Kota Jakarta pada 22 Juni 2011 genap berusia 484 tahun. Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, Jakarta menjadi kota terbesar di Indonesia. Kegiatan pemerintahan, ekonomi, sosial budaya yang masih terpusat di Ibukota, menjadikan Jakarta sebagai kota yang padat penduduknya, dengan tidak kurang dari 9,5 juta warganya pada 2011.

Pada kenyataannya, sebagai kota terbesar di Indonesia, tidak menjadikan Jakarta sebagai kota yang paling nyaman untuk hidup. Diukur dengan skala nasional, kelayakan hidup di Jakarta menurut survei tahun 2009, Jakarta ada di peringkat ke-7 dari 26 kota di Indonesia. Sementara bila dibandingkan dengan standar kota-kota internasional, menurut survei Mercer Consulting Group tahun 2009, dalam hal pemenuhan standar kelayakan hidup bagi warganya, Jakarta berada pada peringkat ke-140 dari 215 kota di dunia.

Pemenuhan hak-hak dasar warga Jakarta menjadi permasalahan krusial karena sifatnya adalah mandatoris bagi pemerintah DKI Jakarta. Ukuran good governance juga ditentukan oleh seberapa jauh pemerintah dapat menjalankan tugas memenuhi hak-hak dasar warganya. Update Indonesia kali ini mengangkat tema utama tentang problematika pemenuhan hak-hak dasar warga Jakarta.

Update Indonesia kali ini juga mengangkat tema-tema penting di bidang politik dan sosial. Bidang politik mengangkat tema tentang prospek elektoral Partai Demokrat pasca-kasus Nazaruddin, dan tema mengenai Ruyati dan perlindungan TKI. Di bidang sosial mengangkat tema mengenai berkeadilan lingkungankah tata ruang Jakarta? Juga tema tentang merefleksi APBN untuk percepatan pencapaian MDGs lalu tema mengenai persoalan transportasi publik Jakarta.

Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan bisnis, serta kalangan akademisi dan think tank internasional dalam mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya di Indonesia.

Selamat membaca.

Problematika Pemenuhan Hak-hak Dasar Warga Jakarta

Kota Jakarta pada 22 Juni 2011 genap berusia 484 tahun. Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, Jakarta menjadi kota terbesar di Indonesia. Kegiatan pemerintahan, ekonomi, sosial budaya yang masih terpusat di Ibukota, menjadikan Jakarta sebagai kota yang padat penduduknya, dengan tidak kurang dari 9,5 juta warganya pada 2011.

Pada kenyataannya, sebagai kota terbesar di Indonesia, tidak menjadikan Jakarta sebagai kota yang paling nyaman untuk hidup. Diukur dengan skala nasional, kelayakan hidup di Jakarta menurut survei tahun 2009, Jakarta ada di peringkat ke-7 dari 26 kota di Indonesia. Sementara bila dibandingkan dengan standar kota-kota internasional, menurut survei Mercer Consulting Group tahun 2009, dalam hal pemenuhan standar kelayakan hidup bagi warganya, Jakarta berada pada peringkat ke-140 dari 215 kota di dunia.

Hak dasar warga

Hak dasar warga mengacu pada hak-hak yang dijamin dalam konstitusi. Dalam UUD RI 1945, hak-hak dasar warga mencakup berbagai bidang kehidupan. Di antaranya adalah hak kewarganegaraan (Pasal 26), kesamaan dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27), pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 28), kebebasan beragama dan beribadah (Pasal 29), pertahanan keamanan negara (Pasal 30), pendidikan (Pasal 31), mengembangkan kebudayaan (Pasal 32), usaha-usaha ekonomi (Pasal 33), jaminan pemeliharaan bagi fakir miskin (Pasal 34). Secara operasional, hak dasar yang sering menjadi perhatian dan diakui secara umum bagi terpenuhinya hidup yang layak bagi setiap orang antara lain adalah terpenuhinya pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, administrasi kependudukan, perumahan, air bersih dan sanitasi, dan jaminan sosial, untuk menyebut di antaranya.

Pemenuhan hak-hak dasar warga menjadi permasalahan krusial karena sifatnya adalah mandatoris bagi pemerintah yang bersangkutan. Ukuran *good governance* juga ditentukan oleh seberapa jauh pemerintah dapat menjalankan tugas memenuhi hak-hak dasar warganya.

Beberapa data statistik & survei pemenuhan hak dasar di Jakarta

Data resmi statistik Jakarta Dalam Angka 2010, antara lain menunjukkan masih banyaknya warga usia sekolah yang belum terpenuhi hak dasar atas **pendidikan**. Pada 2009, terdapat tidak kurang dari 507 siswa putus sekolah di tingkat SD, dan 1.592 siswa putus sekolah di tingkat SMP.

Hak atas **pekerjaan**, hingga Februari 2011, tidak kurang dari 542,71 ribu orang berstatus pengangguran atau tidak memiliki pekerjaan. Jumlah ini meningkat 5,24 ribu orang dari 537,47 ribu pada Februari 2010.

Data Survei Puskaptis tahun 2009 menunjukkan 40,55 % warga Jakarta menyatakan tidak mendapatkan pelayanan **kesehatan** yang cukup memuaskan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Survei itu juga mengungkap bahwa pelayanan kesehatan bagi warga miskin masih buruk, yaitu biaya mahal, antrean panjang, dan pelayanan kurang sopan, dan sulit prosedurnya.

Untuk layanan **air bersih** di Jakarta, sebanyak 56,08 % warga menyatakan belum terpenuhi secara memuaskan atas layanan air bersih. Sementara menurut data dari Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air, sekitar 75 % warga Jakarta mengkonsumsi air yang tidak terlindungi, dan sekitar 90-98% air di Jakarta mengandung bakteri E.Coli.

Belum terpenuhinya hak-hak dasar warga Jakarta juga tercermin dari statistik angka kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Jakarta Dalam Angka 2010 juga mencatat jumlah **penduduk miskin** di Jakarta tidak kurang dari 339,6 ribu orang dengan asumsi garis kemiskinan sebesar Rp 320.000 per kapita per bulan.

Hak-hak dasar anak yang terabaikan tercermin pada sejumlah 7.428 **anak terlantar** dan 1.140 **anak jalanan**. Belum terpenuhinya perumahan ditandai dengan tidak kurang dari 1.071 **gelandangan**. Sementara data dari LBH Jakarta menyebutkan bahwa tahun 2011

tidak kurang dari 500 ribu orang terancam digusur dari tempat tinggalnya yang umumnya berdomisili di grey area di daerah yang tidak diperkenankan untuk hunian.

Belum terpenuhinya jaminan kesejahteraan sosial tercermin pula dengan tidak kurang dari 9.244 **lansia terlantar**. Berbagai permasalahan itu menjadi permasalahan kompleks dan struktural terkait hak dasar warga atas **administrasi kependudukan** (KTP, akta kelahiran, dsb) yang masih belum berpihak pada masyarakat miskin dan marginal, sehingga menambah kompleksitas permasalahan kemiskinan kota.

Beberapa data statistik & survei pemenuhan hak dasar di Jakarta

Dalam serial Diskusi Pakar yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute pada bulan Juni-Juli 2011, dapat disimpulkan bahwa problematika pemenuhan hak-hak dasar warga Jakarta merupakan permasalahan yang kompleks. Problematika di pemenuhan hak dasar akan kesehatan, jaminan sosial, pendidikan, identitas kependudukan, air/sanitasi, dan ketenagakerjaan menunjukkan benang merah sebagai berikut. *Pertama*, walau diakui sebagai hak, yang seharusnya dapat diakses, namun problematis dalam pemenuhannya karena warga dalam mengakses haknya itu terkendala faktor yang terutama adalah biaya dan prosedur. *Kedua*, pada umumnya, kelompok rentan dan marginal seperti kaum miskin kota, banyak mengalami perlakuan diskriminasi bahkan perlakuan tidak layak, ketika mengakses pemenuhan hak dasarnya.

Beberapa problematika yang dapat mengemuka antara lain adalah :

- (a) Dikotomi antara sektor formal dan informal, terutama pada sektor ketenagakerjaan, jaminan sosial, dan pendidikan. Misalnya, sistem jaminan sosial dan pemenuhan hak dasar sejauh ini masih berpihak pada warga yang masuk dalam sektor formal. Pendidikan formal masih diutamakan, dan warga kurang mampu masih kesulitan mengakses pendidikan non formal, apalagi formal.
- (b) Lemahnya konsistensi kebijakan dan komitmen implementasinya. Misalnya pada pemenuhan akses dan kualitas pendidikan. Di satu sisi, Pemprov DKI menyiapkan anggaran yang cukup untuk pendidikan dasar dan menengah, namun masih menutup akses pendidikan formal dengan persyaratan masuk sekolah yang kaku.
- (c) Belum adanya kebijakan makro yang konsisten dan pro warga, terutama pro warga miskin. Misalnya, pada pemenuhan hak

warga atas air bersih, yang terkendala pada kecenderungan privatisasi air dan layanan publik lainnya.

- (d) Layanan publik yang belum peduli kelompok rentan, seperti kaum miskin kota, perempuan, dan anak.
- (e) Masih buruknya mentalitas dan layanan publik yang korup baik dari birokrat dan swasta, sehingga pemenuhan hak warga masih terkendala pungutan liar, praktek tidak etis, dan diskriminasi.

Beberapa rekomendasi kebijakan untuk solusi lintas sektoral yang diusulkan adalah sebagai berikut :

- (a) Koordinasi kebijakan di tingkat Pemprov DKI dengan kebijakan makro di tingkat nasional. Koordinasi juga harus didukung dengan komitmen politik dan kepemimpinan yang kuat. Untuk kepemimpinan, dibutuhkan pemimpin DKI yang memahami kondisi dan kebutuhan warganya.
- (b) Tertib pendataan database kependudukan yang tidak hanya mencatat jumlah, namun juga profil warga, termasuk kaum marginal dan yang berada di *grey area* (kawasan yang ada penduduknya namun secara demografis tidak diakui kependudukannya).
- (c) Kebijakan afirmatif yang *pro poor*, untuk melindungi pemenuhan hak-hak kaum miskin, dan kelompok rentan serta marginal, juga kelompok perempuan dan anak. Misalnya di bidang kependudukan dilakukan pemutihan kependudukan, untuk memberikan legalitas warga yang secara *de facto* ada di wilayah DKI Jakarta.
- (d) Perencanaan dan penganggaran yang melibatkan *multistakeholders* (yang selama ini hanya melibatkan Pemprov dan DPRD), sehingga APBD dapat mengakomodasi kebutuhan lebih banyak warga.
- (e) Penegakan hukum yang konsisten dan menghilangkan mental pelaksana yang korup pada birokrat dan swasta. Upaya mendorong audit, monitoring, standarisasi, dan penegakan etika layanan publik harus didorong.

Walau diakui sebagai hak, yang seharusnya dapat diakses, namun problematis dalam pemenuhannya karena warga terkendala faktor biaya dan prosedur. Umumnya, kelompok rentan dan marginal seperti kaum miskin kota, banyak mengalami perlakuan diskriminasi bahkan perlakuan tidak layak, ketika mengakses pemenuhan hak dasarnya.

— Antonius Wiwan Koban —

Prospek Elektoral Demokrat Pasca-Kasus Nazaruddin

Berdasarkan jajak pendapat berbagai lembaga survei dan media massa, tingkat elektabilitas Partai Demokrat semakin menurun. Pasalnya, publik kian tak yakin Demokrat dapat mendorong upaya pemberantasan korupsi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih, setelah mencuatnya kasus mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dan Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Andi Nurpati.

Padahal, sebelumnya partai yang kelahirannya dibidani Susilo Bambang Yudhoyono ini, belum genap berusia delapan tahun, telah berhasil meraih kemenangan spektakuler di Pemilu Legislatif 2009 – memperoleh suara 20,8 persen dan 148 kursi DPR – sekaligus meraih prestasi gemilang memenangkan pemilihan presiden dalam satu putaran. Saat itulah puncak era keemasan perjalanan sejarah Demokrat.

Namun, belum genap pula berusia sepuluh tahun, partai yang dideklarasikan pada 9 September 2001 ini mulai memberikan tanda-tanda mengalami titik balik sejarahnya. Kedua fenomena ini – kemenangan Demokrat di 2009 dan mulai melemahnya elektabilitas Demokrat hari-hari ini – memunculkan pertanyaan reflektif: faktor apa saja menjadi kekuatan utama Demokrat di 2009, lalu apa saja tanda-tanda awal titik balik kekuatan Demokrat itu?

Faktor kemenangan 2009

Paling tidak ada empat faktor penyebab menguatnya elektabilitas Demokrat yang sekaligus mengantarnya sebagai pemenang Pemilu 2009. *Pertama*, kekuatan magnet figur sentral Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang juga calon presiden terkuat 2009. Meskipun persentase dukungan terhadap SBY jauh lebih tinggi dari perolehan dukungan terhadap Demokrat, tetapi elektabilitas keduanya berkorelasi positif. Artinya, kenaikan dukungan terhadap

SBY berpengaruh terhadap Partai Demokrat. Karena itu, kekuatan figur Yudhoyono merupakan salah satu kunci kemenangan Demokrat di 2009.

Kedua, Demokrat berhasil mengklaim program-program keberhasilan pemerintah menjadi prestasinya. Persepsi keberhasilan pemerintah itu terkait dengan penilaian positif terhadap kebijakan-kebijakan populer, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan PNPM Mandiri. Meskipun Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla juga berperan penting, namun klaim keberhasilan itu berhasil dicitrakan sepenuhnya sebagai kesuksesan Demokrat. Karena itu, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah juga menjadi faktor penting kemenangan Demokrat di 2009.

Ketiga, Demokrat menjadi partai yang paling positif citranya dalam persepsi pemilih berdasarkan survei-survei menjelang Pemilu 2009. Persepsi citra positif itu salah satunya dianggap sebagai partai paling bersih dari korupsi. Citra bersih dan antikorupsi ini pula salah satunya mendukung kemenangan Demokrat di Pemilu 2009.

Keempat, secara internal soliditas Demokrat cukup baik menjelang Pemilu 2009. Walaupun ada faksionalisme di Demokrat, tentu tak sekuat seperti di Golkar, karena kekuatan figur Yudhoyono sebagai “Bapak” bagi semua “kelompok” dan faksi politik di internal Partai Demokrat. Faktor soliditas dan keberhasilan mengelolah faksionalisme juga menjadi faktor pendukung kekuatan Demokrat di Pemilu 2009.

Keempat hal inilah menjadi penyangga kekuatan sekaligus faktor kemenangan Demokrat di 2009. Hanya saja, apakah keempat modalitas utama ini masih mampu dipertahankan Demokrat di 2014 nanti, dan adakah strategi atau faktor lain yang dapat diandalkan Demokrat selain keempat hal itu untuk mempertahankan kemenangan di 2014.

Prospek 2014

Meskipun Pemilu 2014 masih tiga tahun lagi, tetapi setidaknya tanda-tanda titik kritis kekuatan elektoral terindikasi dari melemahnya empat penyangga kekuatan elektoral Demokrat. *Pertama*, kekuatan figur dan karisma Yudhoyono telah mengalami titik balik. Faktor Yudhoyono tidak dapat mencalonkan diri lagi di Pemilu 2014 tentu saja berpengaruh terhadap kharismanya menjelang 2014. Apalagi, berdasarkan hasil survei dan jajak pendapat, tingkat kepuasan terhadap Yudhoyono semakin merurun. Artinya, figur Yudhoyono

tidak dapat lagi diandalkan sebagai “jualan” utama Demokrat di 2014. Kalaupun masih, dipastikan daya tariknya tak sekuat di 2009 lalu.

Kedua, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah juga semakin menurun. Indikasi penurunan itu juga terlihat dari tren penurunan dalam hasil jajak pendapat dan survei-survei belakangan ini. Pemerintahan Yudhoyono-Boediono dinilai gagal menuntaskan kasus besar bidang hukum dan pemberantasan korupsi seperti Bank Century, rekening “gendut” pejabat Kepolisian, kasus mafia perpajakan, dan yang paling anyar kasus mantan Bendaraha Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Hal ini berimbas terhadap penurunan elektabilitas Demokrat, dan ini tentunya menjadi kabar buruk bagi Demokrat.

Ketiga, citra sebagai partai paling bersih dan antikorupsi semakin memudar akibat kasus-kasus korupsi yang menyerempet nama-nama petinggi Partai Demokrat. Fenomena ini tak hanya di pusat, kader-kader Demokrat yang menjadi kepala daerah dan anggota DPRD juga banyak tersangkut kasus korupsi. Berbeda dengan 2009, kader-kader Demokrat belum banyak menjadi kepala daerah. Memburuknya citra Demokrat juga menjadi titik kritis bagi Demokrat dalam menghadapi Pemilu 2014.

Keempat, soliditas Demokrat juga terancam akibat menguatnya pertarungan faksi-faksi di internal, dan kasus Nazaruddin menjadi pemicu menguatnya faksionalisme itu. Para elite dalam faksi saling melemahkan, apalagi sebagai partai gigantisme, Demokrat tidak terbiasa menyelesaikan persoalan internal secara mandiri dan terlembaga. Kondisi seperti ini akan menjadi ancaman serius bagi Demokrat. Seandainya Demokrat gagal mengelola faksionalisme, maka hal ini juga akan menjadi titik kritis bagi Demokrat di 2014.

Keempat hal ini menjadi titik-titik kritis Demokrat di 2014. Akhirnya, semua berpulang kepada Yudhoyono dan elite-elite Demokrat. Sejauh mana keberhasilan dalam menyiapkan figur kuat setelah Yudhoyono -- sembari perlahan melepaskan diri dari ketergantungan pada Yudhoyono -- dan calon presiden 2014; keberhasilan menuntaskan kasus-kasus besar dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah; kesungguhan membersihkan dan memperbaiki citra partai, serta kesuksesan dalam mengelola potensi faksionalisme dan konflik internal. Jika keempat hal itu gagal, maka hampir dapat dipastikan Demokrat benar-benar mengalami titik balik sejarahnya.

Belum genap berusia delapan tahun, Demokrat telah berhasil meraih kemenangan spektakuler di Pemilu 2009. Namun, belum genap pula berusia sepuluh tahun, partai ini mulai memberikan tanda-tanda mengalami titik balik sejarahnya.

— **Hanta Yuda AR** —

Ruyati dan Perlindungan TKI

Hukum pancung terhadap Ruyati, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Mekah, Arab Saudi pada 8 Juni 2011 dilakukan tanpa sepengetahuan Duta Besar (Dubes) Indonesia di Arab Saudi. Hal ini menunjukkan kelambanan pemerintah dalam merespon kejadian yang menimpa warganya di luar negeri.

Kejadian demi kejadian kekerasan dan tindak pidana yang selalu berulang terjadi menimpa TKI di luar negeri menunjukkan upaya-upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran tidak berjalan sebagaimana mestinya. Namun, pemerintah sendiri merasa program perlindungan itu sudah berjalan dengan baik, Hal ini tergambar dengan jelas pada pidato Presiden SBY pada Konferensi organisasi Buruh Sedunia (ILO) di Jenewa Swiss tentang perlindungan tenaga kerja yang mendapat sambutan luar biasa dari peserta konferensi.

Kisah Ruyati bermula dari pembunuhan yang dilakukan Ruyati terhadap majikannya Kahiriya Hamid binti Mijlid pada 10 Januari 2010. Pembunuhan ini menurut pengakuan Ruyati dilakukan karena Ruyati sering dimarahi dan tidak mendapatkan pembayaran gajinya selama 3 bulan sebesar SR 2.400. Permintaan Ruyati untuk dipulangkan ke Indonesiapun tidak dipenuhi oleh majikannya tersebut. Pada 3 dan 10 Mei 2010, Ruyati diadili dan terancam hukuman Qisas/hukuman mati. Pada 18 Juni 2011, eksekusi pancung terhadap Ruyatipun dilakukan tanpa ada pemberitahuan pelaksanaan hukuman dari otoritas Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia

Akar persoalan

Kasus Ruyati hanyalah puncak gunung es dari dari persoalan yang menimpa TKI sejak lama. Menurut Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, ada sekitar 303 Tenaga Kerja Indonesia yang terancam hukuman mati karena berbagai kasus yang terjadi pada periode 1999-2011. Dari 303 WNI dan TKI yang terancam hukuman mati, di Arab Saudi ada 28 kasus diantaranya 22 kasus pembunuhan dan enam kasus lainnya.

Ada 3 hal yang selama ini menjadi akar permasalahan yang menimpa TKI di luar negeri:

1. Pola rekrutmen.

Perekrutan TKI selama ini dilakukan secara tidak tepat dengan melanggar banyak aturan standar yang sesungguhnya sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam kasus Ruyati misalnya, penyalur tenaga kerja yang mengirim Ruyati disangka melakukan pemalsuan umur. Berdasarkan UU Tenaga Kerja, seorang TKI harus berusia minimal 18 tahun dan maksimal 39 tahun. Sedangkan usia Ruyati ketika diberangkatkan berumur 54 tahun.

Hal ini memang sering dilakukan oleh penyalur tenaga kerja yang tidak mendapatkan pengawasan yang ketat dari Kementerian Tenaga Kerja. Imbas lainnya dari model perekrutan ini TKI juga mendapatkan informasi yang minim terkait keberangkatan mereka, serta kondisi negara tempat mereka akan dipekerjakan. Sehingga TKI yang dikirim lewat jalur ini tidak mengetahui prosedur perlindungan TKI, serta informasi penting lainnya yang menyangkut keselamatan dan perlindungan selama mereka bekerja.

2. Keahlian/skill

Rekrutmen yang dilakukan perusahaan penyalur TKI seringkali tidak mengindahkan persyaratan, seperti keahlian yang mutlak diperlukan untuk bekerja di luar negeri. Hal ini diperburuk oleh kenyataan bahwa calon TKI yang memilih jalur penyalur swasta mayoritas berasal dari orang yang berpendidikan rendah.

Keahlian yang tidak memenuhi standar minimal kebutuhan majikan tersebut seringkali menjadi pemicu persoalan kekerasan, pelecehan dan sebagainya yang menimpa TKI yang seringkali berujung kepada kasus pidana

3. Perlindungan hukum

Hal lain yang terlihat dari kasus Ruyati adalah tidak maksimalnya perlindungan pemerintah terhadap TKI yang menghadapi kasus hukum di luar negeri. Ketika pengadilan terhadap Ruyati berlangsung, berdasarkan keterangan Dubes Arab Saudi, Gatot Abdullah Masyhur, terpidana mati Ruyati sedari awal tidak didampingi oleh pengacara dan hanya didampingi oleh staf KJRI.

Prosedur ini perlu diperbaiki oleh pemerintah. Pendampingan hukum terhadap TKI yang tersangkut kasus pidana adalah keniscayaan dan merupakan kewajiban pemerintah dalam melindungi warganya. Hal yang melatarbelakangi tindakan pidana yang dilakukan TKI adalah sesuatu yang harus diungkap di pengadilan dan seharusnya menjadi pertimbangan serius oleh pengadilan Arab Saudi sehingga diharapkan dengan adanya bantuan hukum tersebut hukuman yang menimpa TKI dapat diperingan.

Rekomendasi

Kasus Ruyati harus menjadi pelajaran pahit bagi Pemerintah RI, oleh karena itu Pemerintah RI sebaiknya melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kementerian Luar Negeri sebaiknya melakukan evaluasi kinerja Perwakilan RI di Arab Saudi terkait dengan perlindungan WNI di Arab Saudi;
2. Pemerintah RI dalam hal ini Kemnakertrans harus melakukan kontrol ketat terhadap Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dan melakukan pembinaan, penertiban, serta penindakan terhadap PPTKIS (Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) untuk menjamin bahwa semua TKI yang diberangkatkan ke luar negeri adalah pekerja yang legal dan terdaftar, sehingga memudahkan penanganan untuk perlindungannya apabila terjadi kasus-kasus yang membutuhkan bantuan, termasuk dalam delik hukum
3. Pendidikan TKI baik melalui *training* keahlian maupun bahasa perlu dibuatkan standar khusus. Dengan standar yang ditentukan pemerintah, maka diharapkan TKI yang dikirim mampu memenuhi kebutuhan majikan di negeri tujuan, sehingga kasus kekerasan dapat ditekan.
4. Perlindungan TKI perlu ditingkatkan. Pemerintah harus ikut menangani standar kontrak kerja TKI, terutama menyangkut gaji yang layak. Pemerintah juga harus melakukan mengusahakan instrumen hukum di Arab Saudi yang memberikan sanksi yang layak bagi majikan, yang terbukti melakukan tindakan kekerasan terhadap Pekerja rumah Tangga (PRT). Pendampingan hukum yang dilakukan pengacara yang ditunjuk pemerintah sebaiknya dijadikan prosedur standar dalam memberikan bantuan terhadap TKI yang tersangkut masalah hukum dengan harapan pengadilan berjalan dengan seadil-adilnya.

5. Moratorium TKI ke Arab Saudi yang akan dilakukan pemerintah pada 1 Agustus 2011 adalah langkah yang tepat hingga Arab Saudi menyepakati jaminan perlindungan dan pemberian hak TKI. Hal ini juga harus diikuti dengan pendataan jumlah TKI dan kondisi TKI saat ini di Arab Saudi khususnya. Dokumentasi ini penting untuk memantau keberadaan TKI dan kasus-kasus yang menyimpannya, sehingga bila diperlukan bantuan hukum dapat segera diberikan.
6. Pembayaran denda seperti yang telah pemerintah lakukan terhadap TKI Darsem sebesar Rp. 4,7 M adalah kebijakan yang kurang tepat dan tidak banyak bermanfaat untuk kedepannya. Hal ini akan menjadi preseden yang akan menyulitkan pemerintah sendiri dan bukan solusi yang efektif. Yang harus dilakukan pemerintah setidaknya dengan menjalankan rekomendasi 1-4 di atas, sehingga kasus pidana dapat dikurangi seminimal mungkin. Bila penebusan ini dijadikan solusi, maka bukan tidak mungkin kasus pidana pembunuhan akan meningkat karena TKI merasa pemerintah akan menebus mereka.

Kebijakan pemerintah seharusnya adalah memberikan bantuan hukum yang akan membela TKI bila terjadi tindak pidana sehingga mereka mendapatkan pengadilan yang benar-benar adil. Bagaimanapun juga tindak pidana adalah kejahatan dan harus mendapatkan hukuman. Bagaimana jadinya bila terpidana di tanah air juga meminta pemerintah melakukan hal yang sama? Bukankah TKI dan pekerja domestik lainnya memiliki hak yang sama sebagai warga negara Indonesia?

Sesungguhnya perlindungan yang diberikan kepada TKI bukan sekedar penebusan bila mereka melakukan tindak pidana, namun bantuan hukum yang akan membela mereka bila terjadi tindak pidana tersebut. Dengan demikian, mereka mendapatkan pengadilan yang benar-benar adil.

— **Benni Inayatullah** —

Berkeadilan Lingkungankah Tata Ruang Jakarta

Bicara tentang tata ruang wilayah, artinya juga bicara tentang kependudukan, lingkungan hidup, ekonomi dan juga politik. Semua aspek ini saling terkait satu dan yang lainnya. Perspektif lingkungan hidup adalah perspektif yang bisa digunakan untuk menyorot semua aspek tata ruang ini, terutama mengaitkannya dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jakarta.

RTH Jakarta saat ini hanya sebesar 9,6 % dari total 657 kilometer persegi luas Jakarta. Luas yang diamanatkan oleh UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah sebesar 30%. Sedangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, hanya menargetkan 14,27 % RTH pada 2030. Jika dilihat dari sejarah RTH Jakarta, pada tahun 1970 luas RTH Jakarta adalah 37,4 % dan pada tahun ini seluas 9,6 % saja.

Kenapa RTH Jakarta semakin sedikit?

Terkait aspek kependudukan, jumlah penduduk Jakarta berdasarkan hasil sensus BPS 2010 adalah sebanyak 9,6 juta jiwa. Bertolak dari status Jakarta yang juga adalah kota inti dari kawasan Jabodetabekpunjur, maka jumlah penduduk Bodetabekpunjur juga menjadi indikator penting. Jumlah penduduk Jakarta dan daerah-daerah Bodetabekpunjur adalah 29,8 juta Jiwa per 2010.

Jumlah besar penduduk Jakarta membutuhkan lahan yang juga besar untuk pemukiman dan kegiatan usaha. Pada bagian lain, jumlah penduduk Bodetabekpunjur yang besar, menjadi beban besar bagi ruang Jakarta karena lebih dari 5 juta penduduk Bodetabekpunjur tersebut bekerja di Jakarta.

Terkait aspek ekonomi. Penggunaan lahan Jakarta sejauh mungkin digunakan untuk kegiatan yang akan menghasilkan pendapatan asli daerah dari pajak dengan mendatangkan investor sebanyak mungkin. Maka sebagian besar ruang Jakarta adalah untuk sarana komersil, perkantoran dan permukiman yang *superblock*.

Dengan fokus penggunaan ruang yang pro investor ini, maka fokus ke persamaan hak semua warga Jakarta terabaikan. Dalam artian meminggirkan paradigma keadilan pembangunan.

Aspek kependudukan dan aspek ekonomi di atas, bermuara pada kebutuhan ruang di Jakarta untuk tempat penduduknya bermukim dan bekerja. Dan dalam kaitannya dengan RTH, sering kali yang dikorbankan untuk memenuhi kebutuhan ruang tersebut adalah RTH.

Dampak RTH yang sedikit di Jakarta

Dampak nyata dari sedikitnya RTH di Jakarta adalah banjir. Banjir masih menjadi momok menakutkan bagi Jakarta. Serangkaian program penanggulangan banjir dari Pemprov Jakarta masih belum berhasil membuat Jakarta bebas banjir, seperti pembangunan Kanal Banjir Barat dan Timur, pembuatan polder, perbaikan gorong-gorong, dan sebagainya. Dari 76 titik banjir di seluruh Jakarta, baru tertangani 16 titik banjir saja.

Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang menginisiasi proyek penanggulangan banjir bersama dengan pemerintah Kota Rotterdam, Belanda, yaitu pembangunan *giant sea wall* (dam laut raksasa) di sepanjang Pantai Utara Jakarta. Proyek ini dinilai Pemprov sebagai proyek mutakhir yang akan bisa menyelesaikan masalah banjir Jakarta.

Persoalannya kemudian adalah bahwa pembangunan *giant sea wall* ini kemungkinan besar akan terintegrasi dengan proyek reklamasi pantai utara Jakarta.

Proyek reklamasi pantai utara Jakarta adalah masalah tersendiri dalam tata ruang Jakarta. *Pertama*, proyek ini sudah menyebabkan rusaknya daerah konservasi hutan bakau di utara Jakarta yang merupakan sarana penahan abrasi laut. *Kedua*, proyek ini juga menyebabkan putusnya muara 13 sungai di Jakarta. Sebagaimana diketahui, ketiga belas sungai yang mengalir di Jakarta bermuara ke pantai utara Jakarta.

Ketiga, proyek ini merusak ekosistem di daerah lain. Proyek reklamasi pantai utara Jakarta mengambil tanah untuk urukannya dari kawasan Bojong dan Parung, Bogor. Padahal daerah ini pada Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur ditetapkan sebagai daerah resapan bagi kebutuhan air bersih Jakarta.

Ruang-ruang untuk Jakarta berkeadilan lingkungan

DKI Jakarta seharusnya memiliki perda RTRW yang berkeadilan lingkungan. Raperda RTRW DKI Jakarta 2010-2030 yang masih belum disahkan DPRD DKI Jakarta, masih memungkinkan munculnya masalah-masalah ekologis seperti yang dijabarkan di atas. Sehingga, penting untuk merevisi perda tersebut agar berkeadilan lingkungan.

Ada dua hal yang bisa dilakukan. *Pertama*, melakukan harmonisasi Raperda RTRW 2010-2030 dengan kebijakan-kebijakan terkait. Hal ini agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan dan kewenangan.

Tabel : Peraturan Perundang-undangan terkait Penataan Ruang dan Wilayah

No	Peraturan Perundang-undangan	Tentang
1	UU No. 28 Tahun 2002	Bangunan Gedung
2	UU No. 7 Tahun 2004	Sumber Daya Air
3	UU No. 17 Tahun 2007	RPJPN Tahun 2005-2025
4	UU No. 23 Tahun 2007	Perkeretaapian
5	UU No. 24 Tahun 2007	Penanggulangan Bencana
6	UU No. 27 Tahun 2007	Pengelolaan Wilayah Pesisiran Pulau-Pulau Kecil
7	UU No. 29 Tahun 2007	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI
8	UU No. 18 Tahun 2008	Pengelolaan Persampahan
9	PP No. 26 Tahun 2008	RTRW Nasional
10	Perpres No. 54 Tahun 2008	Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur
11	UU No. 32 Tahun 2009	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tata ruang Jakarta yang berkeadilan lingkungan adalah sebuah keharusan. Komitmen dari pemerintah provinsi DKI Jakarta mutlak diperlukan untuk mewujudkan Jakarta yang berkeadilan lingkungan dengan melibatkan masyarakat sebagai sumber pengetahuan guna mengumpulkan modal sosial Jakarta itu sendiri.

Sumber: Bappeda DKI Jakarta, 2009.

Kedua, pelibatan warga Jakarta dalam penyusunan Perda RTRW. Keterlibatan warga Jakarta harus dilihat bukan hanya sebagai salah satu sarana partisipasi politik warga, namun Pemprov DKI harus bisa menjadikan masyarakat Jakarta, sebagai sumber pengetahuan dan sumber daya membangun. Proses partisipasi dalam konteks ini juga penting untuk membangun modal sosial, serta membangun rasa kepemilikan warga akan kotanya.

— **Lola Amelia** —

Merefleksi APBN untuk percepatan MDGs

Sekretaris Jendral PBB, Ban Ki-Moon menegaskan bahwa kendala waktu tidak layak dijadikan alasan kegagalan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) baik secara moral maupun praktis, karena janji-janji tersebut adalah untuk mewujudkan dunia yang lebih.

MDGs pada hakikatnya juga tujuan negara kesatuan Republik Indonesia untuk mensejahterakan masyarakatnya. Perbedaannya hanya terletak pada jangka waktu yang ditetapkannya, yaitu dari 1990-2015 dan dengan beberapa indikator target.

Per tahun 2011 ini, berarti tinggal 4 tahun saja bagi Indonesia untuk mencapai semua tujuan pembangunan milenium tersebut. Fakta yang dijumpai pada laporan tahun 2010 pencapaian MDGs Indonesia yang dikeluarkan oleh Bappenas adalah bahwa Indonesia mencatat kemajuan dalam menanggulangi kemiskinan, penyediaan akses pendidikan dasar, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, serta memerangi penyakit malaria dan penyakit menular lainnya.

Di sisi lain, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam komitmen meningkatkan kesehatan ibu, penyediaan akses air minum yang layak dan sanitasi dasar, mencegah penyebaran HIV/AIDS, serta kerusakan hutan.

Untuk tujuan-tujuan yang belum tercapai tersebut, pemerintah mengatakan bahwa mereka kesulitan menumbuhkan komitmen para pelaksana pencapaian tujuan ini, kurangnya ketersediaan sumber daya dan kurangnya akuntabilitas.

Melihat kuantitas dan alokasi APBN Indonesia

Pada pertengahan Juni 2011 lalu, Perkumpulan Prakarsa mengadakan sebuah konferensi dengan tema Pembiayaan MDGs untuk Indonesia. Dari konferensi tersebut, mengemuka fakta bahwa, selama ini Pemerintah selalu mengeluh jika mereka kekurangan sumber dana. Faktanya, Pendapatan pada APBN 2011 sebesar 1.200 T.

Namun, pendapatan besar ini tidak paralel dengan kesejahteraan rakyat, selain belum tercapainya semua tujuan MDGs, fakta lain adalah memang benar secara persentase jumlah penduduk miskin menurun, yaitu sejumlah 13,3 %. Namun, acuan pemerintah dalam menetapkan garis kemiskinan adalah Rp 7.000 / hari tidak tepat, karena banyak penduduk yang berpendapatan di atas itu juga tidak bisa memenuhi berbagai kebutuhan dasarnya.

Lalu kemana perginya pendapatan di APBN yang besar tadi? Masalah terkait pendapatan yang besar itu adalah pada pengalokasian dari APBN itu sendiri, dimana antara 60-80% nya adalah untuk anggaran rutin, membayar gaji pegawai negeri sipil (Kemendagri, 2011).

Hal ini menunjukkan bahwa APBN masih pro birokrasi, pro elit yang jumlahnya 3 juta orang lebih atau tidak sampai 3 % dari seluruh rakyat Indonesia (Bappenas, 2011). Belum lagi dengan kebocoran anggaran karena praktek korupsi di semua *stakeholders* (eksekutif, yudikatif, dan legislatif). Data dari Kemendagri, 155 bupati dan ada hampir 50 orang anggota DPR jadi tersangka korupsi.

Pertanyaannya kemudian, jika persoalan sumber dana yang selama ini disalahkan atas belum berhasilnya pencapaian MDGs tidak terbukti, maka kurangnya komitmen dan akuntabilitas pelaksana sebuah keniscayaan.

Namun apa yang bisa dilakukan oleh berbagai *stakeholders* di luar pemerintah?

Komitmen siapa dan apa untuk pencapaian tujuan MDGs

Pada bagian ini akan ditinjau komitmen beberapa *stakeholders* di luar pemerintah, karena kewajiban dan komitmen yang diperlukan oleh pemerintah sudah jelas tercantum dalam konstitusi dan berbagai dokumen kebijakan. Hal yang diperlukan dari pemerintah adalah kemauan untuk melaksanakan apa yang sudah direncanakan.

Sedangkan pihak-pihak di bawah ini, adalah pihak-pihak yang strategis mendesakkan percepatan pencapaian MDGs terhadap pemerintah, secara langsung atau pun melalui program alternatif yang mereka kembangkan.

Pertama, peningkatan peran DPR RI. Beberapa hal yang bisa dilakukan DPR RI adalah: 1) meningkatkan pengawasan program dan anggaran, baik pada level perencanaan maupun pencapaian pembangunan; 2) mendorong pencapaian RPJMN yang lebih menekankan kualitatif, di samping pencapaian target secara kuantitatif; 3) mendorong keterbukaan informasi, serta 4) mendorong upaya reformulasi dana perimbangan.

Kedua, meningkatkan peran *civil society*. *Civil society* merupakan kekuatan masyarakat yang otonom dan demokratis di hadapan negara. Kekuatan *civil society* di negara tidak berdiri dalam posisi *vis a vis* negara secara langsung atau frontal, tetapi berintegrasi dengan dan berada dalam relasi yang lebih moderat di hadapan negara.

Kekuatan *civil society* di Indonesia menunjukkan peran yang lebih terbuka, sehingga mampu menjadi kontrol dan penyeimbang terhadap peran negara, sekaligus menjadi kekuatan sosial yang signifikan dalam pemberdayaan masyarakat di akar rumput (Nashir, 2011).

Oleh karena itu, penting untuk pemerintah untuk meningkatkan kerja sama kemitraan dengan *civil society* secara lebih progresif dan intensif.

Ketiga, meningkatkan peran swasta. Program-program CSR pihak swasta seyogyanya adalah untuk menciptakan *pro-poor business* (Barwa, 2011). Maksudnya, perlu dipastikan bahwa perusahaan mampu mempercepat dan mempertahankan akses masyarakat miskin terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan dan memberikan peluang penghasilan dan yang berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi.

Kendala waktu tidak layak dijadikan alasan kegagalan dalam mencapai MDGs, baik secara moral maupun praktis. Kewajiban dan komitmen yang diperlukan dari pemerintah sudah jelas tertera dalam konstitusi negara. Namun, peningkatan peran berbagai stakeholders di luar pemerintah, seperti DPR, swasta dan civil society mutlak diperlukan untuk mendesakkan percepatan pencapaian MDGs.

— Lola Amelia —

Persoalan Transportasi Publik Jakarta

Sampai menginjak usianya yang ke-484, Jakarta, Ibukota Republik Indonesia masih bergelut dalam beragam permasalahan. Harapan untuk mewujudkan Jakarta yang bisa memberikan standar kehidupan yang layak bagi warganya ternyata “masih jauh panggang dari api”. Jakarta juga menuju titik batas daya dukungnya dan semakin tidak berdaya dalam menghadapi kemacetan yang dilihat sebagai salah satu persoalan krusial. Transportasi publik di Jakarta ternyata belum mampu menjadi solusi dalam mengatasi masalah kemacetan kronis di Jakarta.

Angkutan umum merupakan alat transportasi vital di perkotaan, termasuk di Jakarta. Bagi masyarakat menengah ke bawah yang tidak punya kendaraan pribadi, angkutan umum menjadi sebuah kebutuhan utama. Sedangkan bagi yang memiliki kendaraan, angkutan umum dianggap lebih ekonomis. Fakta terkini menunjukkan kondisi angkutan massal di Jakarta belum mampu menjawab kebutuhan transportasi warga dan terutama belum memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penumpangnya.

Kondisi Transportasi Jakarta

1	Kebutuhan perjalanan	Kebutuhan perjalanan DKI Jakarta 20,7 juta perjalanan/hari
2	Kendaraan bermotor	<ul style="list-style-type: none"> • Tahun 2009 jumlah kendaraan bermotor DKI Jakarta +/- 6,7 juta unit • Kendaraan pribadi: 6,6 juta unit (98,5%) dan angkutan umum: 91.082 (1,5%) • Pertumbuhan rata-rata 5 tahun terakhir: +/- 8,1% per tahun selama 2004-2009
3	Modal share	<ul style="list-style-type: none"> • Kendaraan pribadi sebesar 98,5% melayani 44% perjalanan • Angkutan umum yang hanya 1,5% harus melayani 56% perjalanan (di antaranya 3% dilayani KRL Jabodetabek)
4	Jaringan jalan	<ul style="list-style-type: none"> • Panjang jalan 7.650 km • Luas jalan 40,1 km² (6,2% dari luas wilayah DKI Jakarta) • Pertumbuhan panjang jalan hanya +/- 0,01% per tahun
5	Biaya kemacetan	Diperkirakan lebih besar dari Rp 35 triliun/tahun, terdiri dari pemborosan BBM, perbaikan kendaraan, biaya kesehatan, menurunnya produktivitas, pencemaran udara, dan transaksi yang tertunda.

Sumber: Kompas, 27 Juni 2011.

Jumlah kendaraan pribadi yang lebih banyak dibanding kendaraan umum memperparah keruwetan transportasi di Jakarta. Pertumbuhan jumlah kendaraan di Jakarta sebanyak 1.172 unit perhari. Terdiri atas 186 mobil dan 986 motor. Total pertumbuhan mobil sebesar 10 persen pertahun dan motor 15 persen pertahun.

Padahal jumlah orang yang diangkut kendaraan pribadi jauh lebih sedikit ketimbang penumpang yang dibawa angkutan umum. Konsekuensinya, ketersediaan moda transportasi massal di Jakarta belum seimbang dengan kebutuhan masyarakat penggunanya. Akibatnya, berdesak-desakan di angkutan umum bukanlah pemandangan yang asing lagi, terutama di pagi hari saat aktivitas dimulai, dan di sore hari ketika orang-orang bersiap pulang ke rumah.

Stragnasi pengembangan transportasi publik Jakarta

Kebijakan pengembangan transportasi publik dan angkutan massal tidak menunjukkan kondisi memuaskan. Tahun 2002, bus kota masih melayani 38,3 persen perjalanan ke tempat kerja. Jumlah ini jauh di atas pengguna sepeda motor sebesar 21,2 persen. Sisanya menggunakan berbagai moda, termasuk mobil. Namun, tahun 2010, penggunaan bus sebagai moda transportasi turun drastis, yakni 12,9 persen dari total kendaraan komuter. Moda transportasi utama yang dipakai ke tempat kerja adalah sepeda motor yang mencapai 48,7 persen.

Keberadaan bus TransJakarta memang memberikan citra baru bagi transportasi umum Jakarta, tetapi belum banyak menarik pengguna kendaraan pribadi. Menurut survei Kementerian Koordinator Perekonomian 2009, sebagian besar pengguna bus TransJakarta adalah pengguna bus reguler. Keberadaan bus TransJakarta belum mampu membuat pengguna sepeda motor beralih ke moda transportasi umum. Hanya sekitar 1 persen pengguna mobil yang beralih ke bus.

Fenomena tersebut menggambarkan "sekaratnya" sarana transportasi umum di Jakarta. Kota megapolitan modern seharusnya bersandarkan pada sistem angkutan umum massal. Pada abad ke-21, Jakarta tidak bisa lagi mengandalkan Metromini, Kopaja, Mikrolet, dan Bajaj untuk melayani masyarakat perkotaan modern yang butuh mobilitas tinggi

Ironisnya, kemacetan yang ditunjang dengan lemahnya penegakan hukum bagi para pelanggar lalu lintas dan pengguna lahan-lahan yang seharusnya digunakan sebagai kawasan pedestrian, hanya memunculkan alasan bahwa dibutuhkan tambahan luas dan panjang jalan. Tidak nampak strategi transportasi yang terarah dan menyeluruh, serta konsisten dalam implementasinya di satu sisi dan lebih menonjolkan retorika dan slogan-slogan semata di sisi lainnya.

Program Transportasi Massal yang dijanjikan untuk dioperasikan sejak pemerintahan Gubernur Sutiyoso dan rencana pengembangan *subway* masih dalam tahap perencanaan teknis. Jika target perencanaan terpenuhi, diperkirakan proyek fisik *subway* baru akan dimulai pada 2012. Jika pembangunannya berjalan lancar, maka baru pada tahun 2016 warga Jakarta akan menikmati layanan MRT.

Pengembangan dan perbaikan transportasi kereta pun masih diliputi dengan persoalan manajemen dan pemeliharaan. Rencana penerapan *Electronic Road Pricing* (ERP) sebagai satu upaya membatasi pergerakan kendaraan bermotor masih membutuhkan analisa sosial-ekonomi dan instrumen pendukung, di samping tentunya sosialisasi kepada publik.

Pembenahan dimulai dari komitmen para pemangku kepentingan yang kemudian diturunkan menjadi kegiatan dan capaian yang terukur, serta pengawasan yang disertai insentif dan disinsentif (*reward and punishment*). Baik atau buruknya sistem transportasi menjadi wajah tata kelola kota Jakarta. Posisi program bus TransJakarta sangat dipertaruhkan. Jika saja perjalanan program bus TransJakarta ini tidak mengarah pada kondisi yang lebih baik, maka program-program lainnya dalam mendukung sistem transportasi massal akan mengalami kondisi yang sama jika tidak ingin menjadi wacana saja.

Tidak nampak strategi transportasi yang terarah dan menyeluruh, serta konsisten dalam implementasinya di satu sisi dan lebih menonjolkan retorika dan slogan-slogan semata di sisi lainnya. Pembentukan dimulai dari komitmen para pemangku kepentingan yang kemudian diturunkan menjadi kegiatan dan capaian yang terukur, serta pengawasan yang disertai insentif dan disinsentif (reward and punishment). Baik atau buruknya sistem transportasi menjadi wajah tata kelola kota Jakarta.

— Endang Srihadi —



THE NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis atas inisiatif Jeffrie Geovanie. Pada saat ini, Direktur Eksekutif dan Riset adalah Anies Baswedan dan Direktur Program adalah Adinda Tenriangke Muchtar.

TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan. **TII** bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik dalam situasi demokrasi baru di Indonesia.

Misi **TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia. **TII** juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, pelatihan, diskusi publik, *policy brief* dan analisis mingguan (*Weekly Analysis*), penerbitan kajian bulanan (*Update Indonesia*) dan kajian tahunan (*Indonesia Report*).

Alamat kontak:

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 194
Jakarta Pusat 10250 Indonesia
Tel. 021 390 5558 Fax. 021 3190 7814
www.theindonesianinstitute.com

RISET BIDANG BISNIS & EKONOMI

Analisis bisnis

Dunia usaha membutuhkan analisis yang komprehensif dalam rangka meminimalisir risiko potensial, sehingga pada saat yang sama dapat meningkatkan nilai bisnisnya. Analisis bisnis merupakan solusi dalam perencanaan stratejik korporat untuk membuat keputusan yang dapat diandalkan. Divisi Riset Kebijakan Bisnis TII hadir untuk membantu para pemimpin perusahaan dengan memberikan berbagai rekomendasi praktis dalam proses pengambilan keputusan.

Riset di bidang bisnis yang dapat TII tawarkan antara lain: **(1) Analisis Keuangan Perusahaan**, yang meliputi analisis keuangan dan kajian risiko keuangan. **(2) Konsultasi Perencanaan Korporat** meliputi riset ekonomi dan industri, evaluasi kinerja, valuasi bisnis dan valuasi merk. **(3) Analisis Pemasaran Strategis** yang meliputi pemasaran strategis dan disain program *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Riset bidang ekonomi

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses penentuan kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, *regulator*, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi**, **(2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional**, **(3) Evaluasi Program**.

RISET BIDANG SOSIAL

Analisis sosial

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi

guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan dan anak.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

SURVEI & PELATIHAN BIDANG POLITIK

Survei Pilkada

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-pilkada. Ada beberapa alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-pilkada, yaitu (1) Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) Sudah masanya meraih kemenangan dalam pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai *vote getter*; serta (4) mengetahui media yang paling efektif untuk kampanye.

Pelatihan DPRD

Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

Telah Terbit

INDONESIA REPORT 2010

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) telah menerbitkan publikasi kajian INDONESIA 2010. Buku Indonesia 2010 ini merupakan salah satu edisi Indonesia Report yang dipublikasikan TII secara tahunan sejak 2005. Tim Penulis adalah peneliti The Indonesian Institute.

TOPIK-TOPIK YANG DIANGKAT DALAM INDONESIA 2010:

- Bagian 1. Kepresidenan Yudhoyono, Sekretariat Gabungan Koalisi, dan Pemerintahan Tersandera.
Penulis: **Hanta Yuda AR**
- Bagian 2. Penyesuaian Otonomi Khusus untuk Aceh dan Papua.
Penulis: **Aly Yusuf**
- Bagian 3. Mengurai Konflik Indonesia-Malaysia.
Penulis: **Benni Inayatullah**
- Bagian 4. Problem Penanganan Bencana Alam.
Penulis: **Endang Srihadi**
- Bagian 5. Peran Negara dalam Toleransi Beragama.
Penulis: **Antonius Wiwan Koban**

Tim Penulis adalah Peneliti The Indonesian Institute, dengan supervisi **Anies Baswedan**, Direktur Eksekutif & Riset, dan **Adinda Tenriangke Muchtar**, Direktur Program.

CARA PEMESANAN :

1. **Pembayaran ditransfer ke Rekening :**
Bank Mandiri Cabang Wisma Nusantara, Jakarta
No. Rek. 103 000 4444 838
Atas Nama: Yayasan Indonesia Untuk Semua
2. **Bukti transfer dikirim ke Sdri. Rahmanita** melalui
Fax. 021. 3190 7815 atau
E-mail: iethapoenya5678@yahoo.com
Tel. 021. 390 5558
3. **Konfirmasi pemesanan** mohon mencantumkan Nama Lengkap, Alamat Lengkap, dan Nomor telepon serta Alamat E-mail yang dapat dihubungi.

Jika Anda tertarik untuk membeli Indonesia Report dalam bentuk Paket (terdiri dari Indonesia Report 2005 s.d. 2010, silakan menghubungi kami di kontak tersebut di atas.



INDONESIA 2010 merupakan laporan tahunan *The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research* mengenai situasi ekonomi, sosial, dan politik Indonesia yang diterbitkan berkala setiap awal tahunnya. Pada terbitan awal tahun 2011 ini yang memuat laporan dan analisis situasi politik dan sosial Indonesia tahun 2010. Secara umum, seluruh tulisan menggambarkan situasi, evaluasi, dan rekomendasi kebijakan. Tidak lupa, tulisan-tulisan ini juga memberikan prediksi untuk tahun 2011.

Ada lima artikel dalam **Indonesia 2010** ini. Bidang politik, tulisan pertama adalah tentang Pemerintahan dan Koalisi Partai; tulisan kedua tentang Otonomi Khusus Aceh dan Papua. Di bidang hubungan internasional, topik yang diangkat adalah Konflik Indonesia-Malaysia. Sementara di bidang sosial, ada dua tulisan yaitu pertama tentang Penanganan Bencana Alam dan kedua tentang Toleransi Beragama.

Mengapa kami memilih topik-topik tersebut? Pemilihan topik-topik itu karena tingkat kepentingan isu-isu yang dibahas. Topik-topik tersebut menjadi rangkaian peristiwa menarik yang terjadi selama tahun 2010. Singkatnya, rangkaian peristiwa tersebut telah menarik perhatian masyarakat. Untuk itu, para pengambil kebijakan dapat menggunakan topik-topik tersebut sebagai catatan penting untuk tahun 2011.

Semoga **Indonesia 2010** dapat digunakan dengan maksimal oleh berbagai pihak, yaitu pengambil kebijakan, *private sector*, media massa, lembaga strategis, akademisi, mahasiswa, dan lainnya.

Anies Baswedan

*Direktur Eksekutif dan Riset
The Indonesian Institute*

Direktur Eksekutif & Riset

Anies Baswedan

Direktur Program

Adinda Tenriangke Muchtar

Dewan Penasihat

Rizal Sukma

Jeffrie Geovanie

Jaleswari Pramodawardhani

Hamid Basyaib

Ninasapti Triaswati

M. Ichsan Loulembah

Debra Yatim

Irman G. Lanti

Indra J. Piliang

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Jeannette Sudjunadi

Rizal Mallarangeng

Sugeng Suparwoto

Effendi Ghazali

Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi

Awan Wibowo Laksono Poesoro

Peneliti Bidang Politik

Benni Inayatullah

Hanta Yuda AR

Peneliti Bidang Sosial

Antonius Wiwan Koban,

Endang Srihadi, Lola Amelia.

Staf Program dan Pendukung

Edy Kuscahyanto, Hadi Joko S.,

Suci Mayang

Administrasi

Diana Paramita, Meilya Rahmi.

Sekretaris: Lily Fachry

Keuangan: Rahmanita

Staf IT: Usman Effendy

Desain dan Layout

Leonhard

Jl. Wahid Hasyim No. 194 Tanah Abang, Jakarta 10250

Telepon (021) 390-5558 Faksimili (021) 3190-7814

www.theindonesianinstitute.com

e-mail: update@theindonesianinstitute.com

